



William & Lily
FOUNDATION

INCEPTION REPORT

**Rapid Asessment
Sumber Penghidupan
Sektor Pertanian,
Sumba Barat Daya**

12 – 16 Maret 2020



DAFTAR SINGKATAN

AHDB	: Atas Dasar Harga Berlaku
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistika
BUM Des	: Badan Usaha Milik Desa
CPCL	: Calon Petani Calon Lokasi
GAPOKTAN	: Gabungan Kelompok Tani
GAP	: <i>Good Agriculture Practices</i>
GHP	: <i>Good Handling Practices</i>
KOPDIT	: Koperasi Kredit atau Credit Union
KSU	: Koperasi Serba Usaha
KSPG	: Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
KWT	: Kelompok Wanita Tani
MT	: Musim Tanam
M4P	: <i>Making Markets Work for The Poor</i>
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PADIATAPA	: Model/pendekatan fasilitasi masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PH	: <i>Power of Hydrogen</i> (Derajat Keasaman)
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
POKTAN	: Kelompok Tani
PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
SBD	: Sumba Barat Daya
SPH-SBS	: Pertanian Hortikultura Laporan Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SWOT	: Analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman)
TJPS	: Program Tanam Jagung Panen Sapi
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan Rapid Asessment	2
1.3 Metodologi	2
1.4 Narasumber Rapid Asessment	2
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH	3
2.1 Profil Wilayah Sumba Barat Daya	3
2.2 Profil Demografi Penduduk	5
BAB 3 POTENSI SDA, SDM DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN	6
3.1 Profil Potensi Pertanian	6
3.2 Karakteristik Sumber Daya Manusia dan Sosial-Budaya	11
3.3 Aktor Kunci Pengembangan Sektor Pertanian	12
3.4 Penguasaan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen	17
3.5 Aspek Ekonomi (Pendapatan)	18
3.6 Arah Kebijakan Sektor Pertanian	18
3.7 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Sektor Pertanian	20
BAB 4 IMPLEMENTASI PROGRAM KAJIAN DEMOGRAFI, MATA PENCAHARIAN DI SEKTOR PERTANIAN DAN RANTAI NILAI KOMODITAS	20
4.1. Tujuan Study	22
4.2. Deliverables	22
4.3. Metodologi	22
a Study Approach	20
b Metode dan Alat Pengumpulan Data	23
c Jumlah Sampling	24
d Lokasi Target Pemetaan Demografi	25
e Kerangka Kerja Penelitian dan Sumber Data	26
f FGD Sosialisasi hasil dan Validasi	27
g Analisis dan Rekomendasi	27
4.4. Potential Risk dan Challenges	27
4.3. Tim Pelaksana	28
4.2. Timeline Kegiatan Kajian	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN 1. Outline Laporan Akhir	31

BAB 1 . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) merupakan kabupaten yang memiliki potensi sangat besar dalam sektor pertanian. Mengingat sektor pertanian menjadi sumber penghidupan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian SBD, bahwa lebih dari 70% masyarakat bergantung di dalam hasil sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. Hal ini didukung dengan Data Sumba Barat Daya dalam Angka 2019 menunjukkan 75,9% mata pencaharian utama dan pendapatan masyarakat berasal di sektor pertanian, kehutanan dan penggalian. Dimana sektor pertanian, kehutanan dan penggalian memiliki jumlah tenaga kerja sebesar 118.488 orang dengan total dari semua sektor sebesar 155.953 orang.

Kepemilikan lahan yang luas oleh setiap masyarakat terkhusus petani (rata-rata 1-2 Ha) seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Terlebih berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di tanah Sumba Barat Daya. Akan tetapi, penghidupan masyarakat Sumba Barat Daya menjadi polemik dalam pemerintahan. Dimana banyak petani masih dihadapi dengan permasalahan baik minimnya pengetahuan budidaya, pendampingan dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai khususnya kebutuhan air irigasi baik dari sungai atau pompo air. Kondisi ini memaksa potensi lahan pertanian yang ada, tidak dapat dikelola secara maksimal yang berdampak pada rendahnya pendapatan.

Dilihat tingkat kemiskinan, persentase penduduk miskin SBD tahun 2019 sebesar 28,06% menurun dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 28,88%. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan tahun 2019 sebesar 4,35 juga menurun dari tahun 2018 sebesar 5,35. Menandakan tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya semakin menurun sehingga lebih dekat dengan garis kemiskinan. Serta menurunnya indeks keparahan kemiskinan dari 1,49 tahun 2018 menjadi 0,93 di tahun 2019. Menandakan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya semakin menurun sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin lebih mendekat daripada tahun sebelumnya (BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat SBD 2019). Tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepedulian terhadap pengetahuan akan pendidikan, gizi, kesehatan dan pengembangan sektor pertanian. Disamping itu karakter masyarakat yang masih banyak mementingkan budaya pesta yang berlebihan menjadi faktor utama tingginya kemiskinan disamping rendahnya dukungan dari pemerintah kabupaten.

Disektor pertanian, Sumba Barat Daya memiliki potensi pengembangan sektor pangan dimana memiliki luasan dan produksi padi dan jagung yang cukup besar dalam mendukung penghidupan masyarakat dan ketahanan pangan. Dalam upaya membantu stakeholder kunci khususnya pemerintah kabupaten, kelompok tani dan petani dan stakeholder lain dalam mengembangkan sektor pertanian di SBD. Maka dari itu perlu sebuah data dan informasi yang tepat dan valid dalam upaya membangun strategi pembangunan pertanian. Tahap awal pemetaan, rapid asessment ini di lakukan untuk pengumpulan informasi terkait gambaran umum potensi, stakeholders serta masalah dan tantangan penghidupan masyarakat di SBD secara cepat. Hasilnya akan digunakan untuk memberikan gambaran kegiatan pemetaan demografi dan rantai nilai komoditas, dalam upaya menyusun strategi pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.2. Tujuan Kegiatan Rapid Assessment

Rapid Assessment ini ditujukan untuk memahami dan menganalisa secara cepat situasi terkini tentang potensi dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu juga melihat secara cepat tantangan dan permasalahan pengembangan pertanian yang di alami stakeholder kunci yang ada mulai hulu hingga hilir kaitannya dengan penguatan sektor ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan.

1.3. Metodologi

Rapid Assessment dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat di berbagai Kecamatan dan Desa sesuai dengan contoh sampel yang dipilih secara acak. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 15 sampel untuk semua stakeholder yang terkait dalam sektor pertanian yaitu Dinas Pertanian, Kepala Desa, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, PPL dan Koperasi.

Metode yang digunakan dalam memperoleh informasi ialah dengan Indepht interview atau wawancara mendalam. **Wawancara-Mendalam (In-depth Interview)** merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sampel/narasumber yang akan diwawancara merupakan orang yang mengerti kondisi dan situasi yang terjadi dalam permasalahan maupun potensi terkait sektor pertanian yang ada.

1.4. Narasumber Rapid Assessment

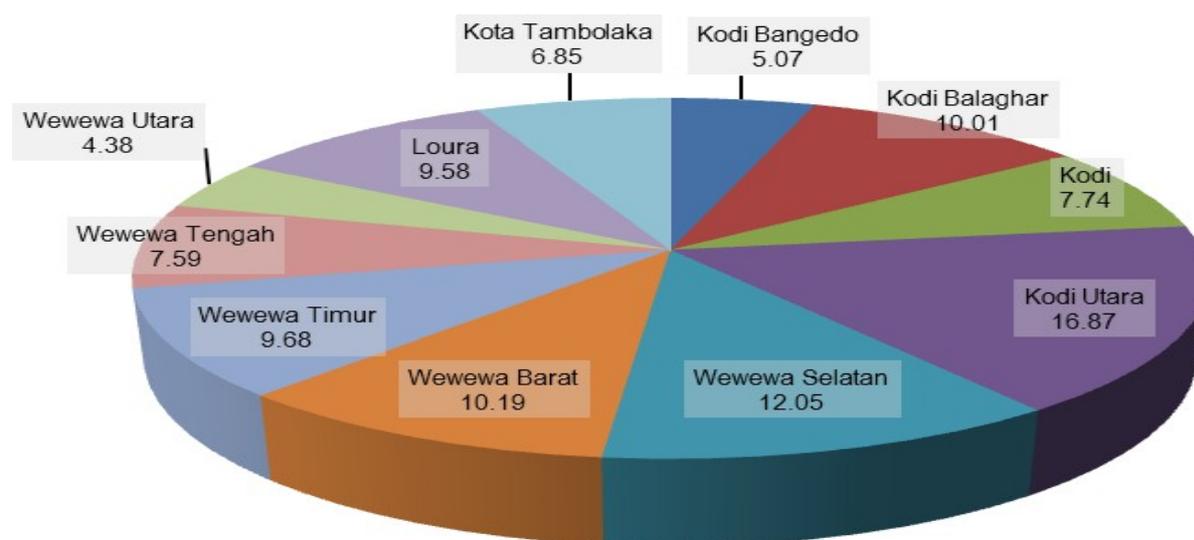
No	Narasumber Rapid Assessment	Jumlah	Kecamatan	Informasi yang di Dimbil
1.	Dinas Pertanian Kabupaten	1	Kota	Kebijakan, program, tantangan dan hambatan pengembangan sektor pertanian
2.	Kepala Desa	3	Kota, Kodi	Rencana strategis desa dan daya dukung lingkungan dalam pengembangan potensi sumber daya alam, kaitannya dalam peningkatan mata pencaharian dan pendapatan di sektor pertanian
3.	Kelompok Tani	5	Kota, Kodi, Kodi Utara dan Wawewa Tengah	Jenis komoditas, besaran potensi, penguatan kapasitas, pemasaran, rantai pasok komoditas dan tantangan dan permasalahan
4.	Kelompok Tani Perempuan	3	Laura dan Wawewa Tengah	Jenis komoditas, besaran potensi, penguatan kapasitas, pemasaran komoditas dan tantangan dan permasalahan
5.	PPL	2	Kodi	Program, pendampingan, tantangan dan hambatan pengembangan sektor pertanian
6.	KOPDIT Swastsari (akses keuangan dan permodalan petani)	1	Kota	Program, tantangan dan hambatan akses keuangan di sektor pertanian

BAB 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1. Profil Wilayah Sumba Barat Daya

Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang baru berdiri pada tahun 2007, hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat (Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007).

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki **luas wilayah** daratan sebesar 1 445,32 km² atau setara dengan 144 532 Ha. Sebagian besar wilayah SBD berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan 14° – 40°. SBD terbagi menjadi 11 wilayah Kecamatan yang terdiri dari 173 desa dan 2 kelurahan. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Kodi Utara yaitu 21 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kota Tambolaka sebanyak 8 desa. (BPS SBD 2019)



Gambar 1. Pembagian luasan wilayah 11 Kecamatan di Sumba Barat Daya
Sumber: Sumba Barat Daya dalam Angka 2019

Dilihat dari **topografi**, Sumba Barat Daya umumnya bervariasi yaitu datar, bergelombang dan berbukit. SBD termasuk dalam **kondisi iklim** yang kering. Namun sebagian kecil wilayah SBD beriklim basah, di mana hanya 5 bulan (Januari sampai dengan Maret, November dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 7 bulan sisanya relative kering (BPS 2019). Bersumber dari petani/kelompok tani yang diwawancarai, seluruh wilayah Sumba Barat Daya pada tahun 2019 hingga 2020 ini, mengalami pergeseran iklim/cuaca. Dimana musim hujan jatuh pada bulan november – Desember tahun 2019 Bulan Desember. Dimana perubahan ini mempengaruhi aktivitas khususnya petani, mengakibatkan mundurnya jadwal tanam.

Tabel 1. Tingkat kemiringan dan ketinggian wilayah Sumba Barat Daya 2019

No	Tingkat Kemiringan	Ketinggian (Mdpl)	Luas Wilayah (Ha)	Kecamatan
1	0 – 8 %	0 – 300	82.519	Kodi Bangedo, Kodi, Kodi Utara, Kota Tambolaka, Loura, serta sebagian kecil Wewewa Barat dan Kodi Balaghar
2	8 – 30 %	300 - 850	62.013	Wewewa Timur, Wewewa Tengah, Wewewa Utara, Wewewa Selatan, dan sebagian besar Wewewa Barat dan Kodi Balaghar

Jenis tanah yang berada Di Sumba Barat Daya umumnya memiliki kesamaan disetiap kecamatan. Jenis tanahnya antara lain jenis tanah alluvial, mediteran, grumosol, latosol dan sedikit podsolik. Kedalaman solum tanah ialah 20-40 cm. Tekstur tanah Sumba Barat daya berupa tanah lempung berdebu, batuan kapur dan liat dengan pH 6,5 – 7,5. Berdasarkan jenis dan tekstur tanah, Sumba Barat Daya termasuk memiliki jenis tanah yang subur. Banyak jenis komoditas yang ditanam di lahan pertanian berupa komoditas pangan, perkebunan dan kehutanan dapat tumbuh dengan baik. Berdasarkan informasi dari petani/kelompok tani yang berhasil diwawancarai saat rapid asesment tentang jenis tanah, bahwa SBD memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, namun tanah yang subur tidak mampu menahan air yang cukup lama, sehingga air yang masuk ke dalam tanah akan cepat menghilang dan kering kembali.

Sektor penggunaan lahan, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 2 jenis lahan yaitu lahan basah dan lahan kering. Lahan basah sebesar 4,65% dan lahan kering sebesar 95,35%, dari luas total wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Tabel 2. Luas penggunaan lahan Kabupaten Sumba Barat Daya 2019

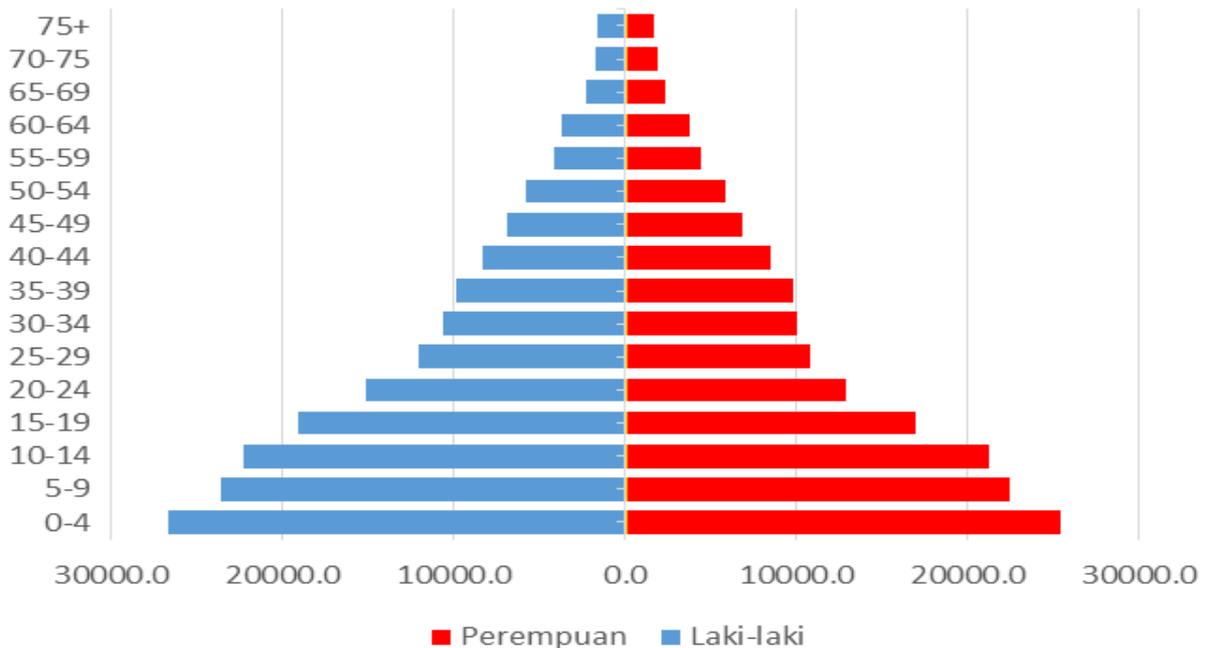
Jenis Lahan	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Presentase (%)
(1) Lahan Basah	a. Sawah Irigasi	4.539,50	3,15
	b. Sawah Tadah Hujan	2.177,25	1,5
	Total	6.716,75	4,65
(2) Lahan Kering	a. Kebun/Tegalan	50,936	25
	b. Pekarangan	11.824	10,28
	c. Ladang/Huma	5,061	13,28
	d. Padang Rumput	7.616	8,7
	e. Hutan Lindung	5.730	4,36
	f. Hutan Produksi	5.857	11,13
	g. Perkebunan	32.372	14,7
	h. Lahan Tidur	13.210	10,27
	i. Lain-lain	8.141	2,28
	Total	137.815,25	95,35

Sumber Data: Identifikasi Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya 2019.

Hasil kajian di 5 kelompok tani dan 3 kelompok tani perempuan di Sumba Barat Daya, umumnya kepemilikan lahan perorangnya rata-rata sebesar 1-2 Ha. Lahan tersebut banyak terdapat jenis komoditas tanaman termasuk tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

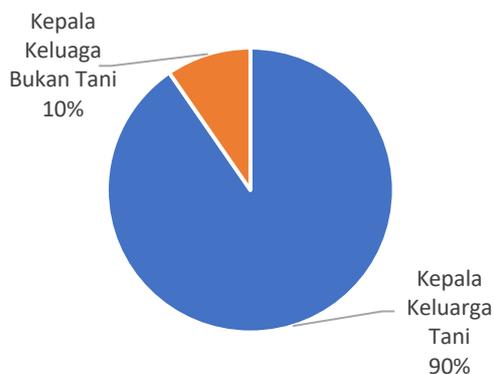
2.2. Profil Demografi Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2018 adalah 234 jiwa/km². Rasio Jenis Kelamin penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2017 adalah 105.38 artinya pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,97%. Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja tahun 2018 berjumlah 155 953 orang dengan persentase laki-laki sebanyak 55,3% dan perempuan sebanyak 44,7%.



Gambar 2. Rasio Jenis Kelamin penduduk Kabupaten Sumba Barat
Sumber: Sumba Barat Daya dalam Angka 2019

Sektor Mata pencaharian: Tingkat pengangguran Kabupaten Sumba Barat Daya yang berumur 15 tahun ke atas sebesar 1,01 % dari total penduduk pada tahun 2018. Sektor terbanyak yang menyerap tenaga kerja pada tahun 2018 adalah sektor pertanian/perburuan/kehutanan/peternakan sebesar 118.488 jiwa yang terdiri dari 54,34% laki-laki dan 45,66% perempuan. Selain itu, sektor industry pengolahan juga banyak menyerap tenaga kerja sebesar 8.583 jiwa yang terdiri dari 43,29% laki-laki dan 56,71% perempuan.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Sumba Barat Daya, jumlah petani di 11 kecamatan sebanyak 41.159 Kepala Keluarga Tani yang terbagi menjadi 2.342 kelompok tani yang telah dikukuhkan sampai tahun 2020 (Data Dinas Pertanian SBD, 2020).

BAB 3. POTENSI SDA, SDM DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

3.1. Profil Potensi Pertanian

Disektor pertanian, Pertanian merupakan sektor penyumbang penyerapan lapangan kerja yang paling banyak. Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumba Barat Daya dari tahun 2013-2017 peranan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih berada di atas kisaran 40,11% kendati besarnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan kontribusi ini salah satunya terjadi akibat pertumbuhan sektor non-pertanian yang lebih cepat (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan, dll). Walaupun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tetap menjadi yang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya.

Komoditas, Poduksi dan Produktivitas. Berdasarkan kanjian cepat lapangan, komoditas terbesar yang paling banyak diusahakan yaitu tanaman pangan diantaranya padi ladang dan jagung. Disektor perkebunan didominasi oleh tanaman mete, kopi dan kakao. Ke lima komoditas tersebut merata di budidayakan di 11 kecamatan. Berdasarkan data luas panen, produktivitas dan produksi tanaman yang banyak diusahakan di Sumba Barat Daya yaitu:

Tabel 3. Luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi berdasarkan jenis tanaman yang banyak diusahakan oleh petani Sumba Barat Daya tahun 2019.

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Musim Tanam (MT)
1	Padi sawah	8.340	8.163	3,3	30.230	2 kali
2	Padi ladang	16.776,25	16.648,25	1,8	33.450	1 kali
3	Jagung	29.276	28.753	3,0	88.124	2 kali
4	Kacang hijau	494,5	274,5	0,6	196,55	1 kali
5	Kacang tanah	664	644,5	0,8	1.661	1 kali
6	Jambu mente	13.452	12.546	0,4	8.219	Sepanjang Tahun
7	Kopi	2.131	2.071	0,7	1.556	Sepanjang Tahun
8	Kakao	1.610	1.524	0,9	1.785	Sepanjang Tahun

Sumber Data: Diolah dari Data Dinas Pertanian Sumba Barat Daya dan Sumba Barat Daya dalam Angka 2019

Tabel 4. Luas tanam, luas panen komoditas Hortikultura yang paling banyak diusahakan oleh petani Sumba Barat Daya tahun 2018

No	Jenis Sayuran	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Cabai	133	1.129
2	Petsai	250	697
3	Tomat	63	484
4	Kacang Panjang	70	466
5	Bayam	69	251
6	Kangkung	67	216

Sumber Data: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS, Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2019

Komoditas hortikultura/sayuran yang paling banyak diusahakan oleh petani yaitu cabai mencapai 1.129 ton tahun 2018 (Tabel 4). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani, penanaman sayur hanya dilakukan pada musim penghujan saja (Musim Tanam ke satu/ MT-1), kecuali area-area lahan sawah irigasi biasanya menanam sepanjang tahun (MT-1 dan MT-2 bahkan hingga MT-3) di sawah-sawah irigasi. Model penanaman rata-rata masyarakat dengan tumpang sari (disela-sela tanaman jagung/kopi/tanaman keras lainnya), jarang petani yang fokus monokultur menanam sayuran. Selain itu untuk pemenuhan sayuran keluarga secara mandiri melalui penanaman sayur polibag di pekarangan rumah masih jarang ditemui.

Tabel 5. Luas panen komoditas Biofarma yang paling banyak diusahakan oleh petani Sumba Barat Daya tahun 2018

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (m2)	Produksi (kg)
1	Kunyit	89.995	67.715
2	Laos	40.240	20.934
3	Jahe	32.200	16.100
4	Kencur	3.420	1.710

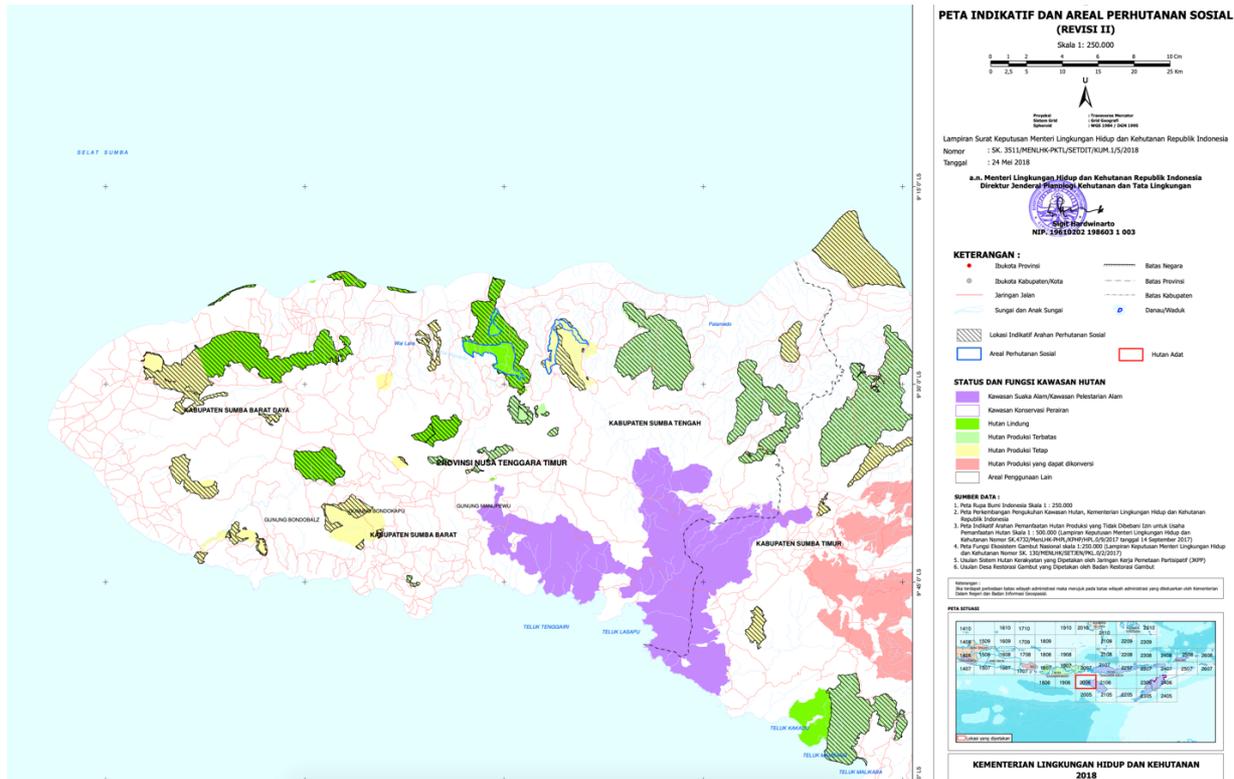
Sumber Data: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS, Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2019

Tabel 6. Luas panen komoditas Buah yang paling banyak diusahakan oleh petani Sumba Barat Daya tahun 2018

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)		Produktivitas (ton/Ha)	Total produksi (ton)
		Tanam (Ha)	Panen (Ha)		
1	Pisang	440	275	10,1	2.902
2	Mangga	240	165,5	10,1	2.516
3	Nangka	227	157,5	6,2	1.137
4	Alpukat	95,3	54,1	5,0	287,4
5	Rambutan	86	65,5	3,1	245,8
6	Jeruk	103,5	42,5	4,8	213,8
7	Salak	43	33	2,1	108
8	Durian	19	18	5,7	104,5

Sumber Data: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-SBS, Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2019

Potensi Sektor Kehutanan, rapid assesment yang dilakukan belum secara detail mengidentifikasi lokasi dan luasan hutan produksi yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan data sekunder yang kami peroleh, di tahun 2018, SBD memiliki status/fungsi kawasan hutan produksi tetap sebesar 8.497.102 Ha. Dilihat dari produksi dan luas lahan panen hasil hutan menurut komoditas di Kabupaten Sumba Barat Daya diantaranya Mahoni sebesar 1.414.354 m³, Jati sebesar 629.105 m³ dan rimba campuran sebesar 2.545.580 m³ (Unit Pengelola Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kab. Sumba Barat Daya - BPS SBD 2019).



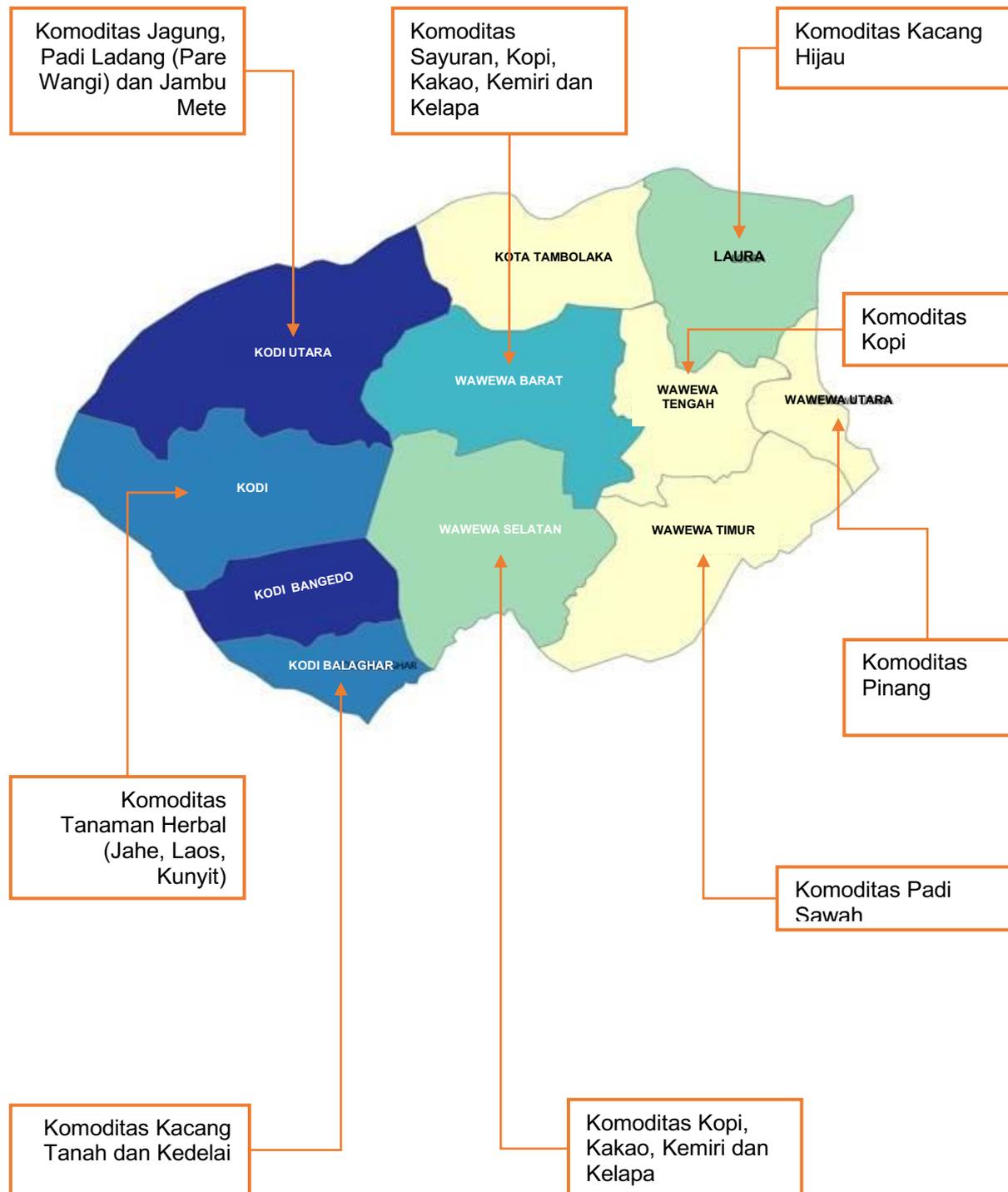
Sumber: <http://appgis.menlhk.go.id/appgis/PIAPS/PIAPS-2006.pdf>

Hasil wawancara kami di kelompok tani (Kelompok Tani Eka Cipta, Kecamatan Wawewa Tengah), bahwa sebagian besar pemanfaatan hutan produksi yaitu dengan menanam tanaman keras seperti tanaman mahoni, jati, serta berbagaimacam buah-buahan. Di sesi kunjungan kami juga menemukan komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu komoditas Vanili, yang dulu sempat menjadi primadona di SBD, hingga akhirnya tidak di budidayakan lagi dikarenakan harganya mengalami penurunan yang cukup drastis.

Selain itu kami juga menemukan komoditas Aren/Enau khususnya di Kecamatan Wawewa yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Mereka hanya menganggap aren sebagai gulma dalam sistem kebun mereka. Padahal memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk rumah tangga (Gula Aren). Produksi ini nantinya juga untuk mendukung kelompok perempuan yang mengolah aneka minuman bubuk (kopi kelor, jahe kelor dll) yang selama ini masih menggunakan gula tebu. Komoditas kemiri juga memiliki potensi untuk dikembangkan hal ini terlihat dari produksi kemiri di tahun 2018 sebesar 1.267 ton.

Jenis komoditas dan potensi (pertanian, kehutanan dan peternakan) akan terus berkembang pada saat pemetaan Demografi yang akan dilakukan.

Hasil kajian cepat yang dilakukan, bersumber dari wawancara Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya 2020. Setiap kecamatan memiliki komoditas yang berbeda-beda sesuai dengan microclimate (iklim dalam satu wilayah spesifik dalam satu area yang lebih luas, dimana iklim mikro di kecamatan tertentu mendukung pertumbuhan tanaman dan memiliki hasil yang lebih maksimal). Berikut merupakan kecamatan yang menjadi produsen terbesar/utama ataupun wilayah yang memiliki kekesuaian microclimate bagi komoditas diusahakan, diantaranya:



a) Potensi Komoditas Tanaman Pangan Lokal (Pare Wangi dan Jagung Lokal)

Tanaman padi dan jagung menjadi potensi paling besar di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan menjadi pendapatan bulanan masyarakat. Luas lahan serta tanah yang subur menjadi faktor pendukung dalam pengembangan potensi pada komoditas tanaman pangan. Kabupaten Sumba Barat Daya hingga saat ini masih melestarikan/menanam jenis padi lokal yaitu **Varietas Pare Wangi (Jenis Padi Gogo)**. Dimana varietas pare wangi ini memiliki aroma wangi yang khas, pulen dan tidak mudah basi. Secara khusus varietas pare wangi ini paling cocok ditanam di Kecamatan Kodi saja. Varietas ini bisa di tanam di wilayah kecamatan lain tetapi aromanya tidak seperti jika ditanam di Kecamatan Kodi.

Kabupaten Sumba Barat Daya juga memiliki potensi **Varietas Jagung Lokal**. Dimana memiliki keunggulan yaitu tidak banyak ampas saat dilakukan penggilingan/penghalusan jagung, umur jagung lebih tahan simpan dan memiliki rasa yang lebih enak saat dikonsumsi. Pengusahaan jagung lokal saat ini sudah tidak banyak lagi dibudidayakan karena memiliki umur panen yang lebih lama (4-5 bulan) dan produksi yang lebih sedikit dibandingkan varietas hibrida. Saat ini jagung hibrida lebih mendominasi tanaman jagung di Sumba Barat Daya karena memiliki produktivitas yang tinggi dan memiliki umur yang pendek yaitu 3 bulan.

b) Potensi Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi primadona masyarakat Sumba Barat Daya sebagai mata pencaharian tahunan yaitu **Komoditas Jambu Mete, Kopi Dan Kakao**. Saat ini produktivitas tanaman mete sudah mulai menurun, dikarenakan umur tanaman banyak yang sudah tua, kurangnya pemangkasan, kurangnya pemupukan dan perawatan. Tanaman jambu mete hampir diusahakan di seluruh kecamatan SBD. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian SBD, sentra produksi jambu mete berada di Kecamatan Kodi Utara.

Adapun potensi lain yang masih belum banyak di dudidayakan yaitu **Komoditas Vanili** dari data BPS tahun 2018, memiliki luasan 84,5 ha dengan total produksi 15 ton. Dalam budidayanya tersentra di Wawewa Barat, Timur, Tengah dan Utara, karena memiliki iklim micro yang sesuai untuk pertumbuhan vanilli.

c) Potensi Komoditas Biofarma

Di sela area perkebunan petani, mereka juga menanam tanaman biofarma seperti **Jahe, Laos dan Kunyit**, sesuai data BPS tahun 2019, tahun 2018 Kabupaten SBD memiliki total produksi jahe 16,1 ton, laos 20,9 ton dan kunyit sebesar 67,7 ton, dan sentra utama produksi berada di Kecamatan Kodi.

d) Potensi Komoditas Buah-Buahan

Sumba Barat Daya juga memiliki potensi buah-buahan yang dijadikan pendapatan mingguan, bulanan bahkan tahunan bagi masyarakat diantaranya yang paling banyak yaitu **Mangga, Pepaya, Nanas, Nangka, Pisang, Alpukat, Rambutan dan Durian**.

e) Potensi Komoditas Hortikultura

Tanaman sayuran banyak diusahakan oleh petani khususnya di Kecamatan Wewewa. Menurut petani, menanam sayuran sangat memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan tanaman pangan dan perkebunan dikarenakan perputarannya cepat dan memiliki harga yang relatif tinggi. Berbagai jenis tanaman sayuran yang ditanam antara lain **Cabai, Petsai, Kacang Panjang, Bayam, Sawi, Kangkung, Tomat**, dan tanaman sayur lainnya dengan skala kecil.

Dari 3 pemerintah desa yang diwawancarai, 2 desa memiliki program tanaman **Dapur Sehat** (menanam sayuran di polibag/botol bekas di sekitar pekarangan rumah), ditujukan untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga. Namun dalam implementasinya masih terkendala kesadaran masyarakat itu sendiri. Sementara ini pemenuhan sayuran masyarakat SBD, disuplai oleh petani di Kecamatan Wawewa Barat dan pemenuhan sisanya di pasok oleh Petani di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur.

3.2. Karakteristik Sumber Daya Manusia dan Sosial-Budaya

Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 3 karakter sosial dalam bekerja. Tiga karakter tersebut dibedakan berdasarkan kondisi wilayah:

a) **Wilayah 1 ialah wilayah yang memiliki ketinggian tempat yang rendah/wilayah pesisir (Kecamatan Kodi, Kodi Utara, Kodi Bangedo dan Kodi Balaghar):**

Wilayah 1/pesisir memiliki kondisi cuaca yang panas dan terik, menyebabkan intensitas waktu kerja petani diladang berkisar 1-3 jam per hari. Secara umum petani di Kecamatan Kodi, Kodi Utara dan Kodi Bangedo masih berorientasi terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik bibit, pupuk kimia dan pestisida (program pemerintah tentang intensifikasi dan ketahanan pangan). Orientasi bantuan ini mengakibatkan hilangnya budaya-budaya lokal yang dulunya ada yaitu budidaya tanaman ramah lingkungan. Dimana petani sebelum ada bantuan pupuk dan pestisida, petani memproduksi pupuknya sendiri dari serasah bahan organik/sisa-sisa panen serta mampu memproduksi pestisida dengan menggunakan bahan-bahan alami dari daun, buah dan tanaman biofarma (pengendalian hayati hama penyakit tanaman).

Budaya adat di Wilayah 1 ini masih sangat kental. Disisi lain adat pesta pernikahan, pemakaman dan sebagainya mempengaruhi pola ekonomi masyarakat, sebagian besar masyarakat lebih mengutamakan pesta diluar kemampuan ekonomi mereka sehingga banyak yang terjerat hutang. Hal ini biasa berdampak pada rendahnya kepedulian terhadap pendidikan anak, gizi dan kesehatan bahkan seringkali hingga kasus kriminal.

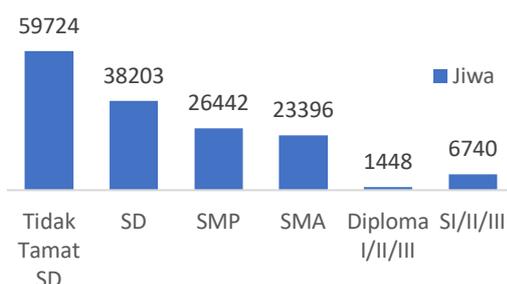
b) **Wilayah 2 ialah wilayah yang memiliki ketinggian tempat yang cukup tinggi/wilayah perbukitan (Wewewa Tengah, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Barat):**

Wilayah 2/perbukitan berbanding terbalik dengan wilayah 1. Petani wilayah perbukitan umumnya memiliki etos kerja yang sangat tinggi, mereka bisa menghabiskan waktu 6-8 jam perhari di ladang. Selain itu, rasa keingintahuan dalam pengembangan pertanian dan keterpedulian terhadap tanaman yang ditanam juga sangat tinggi.

c) **Wilayah 3 ialah wilayah yang dekat dengan perkotaan (Kecamatan Loura dan Kota Tambolaka):**

Wilayah 3/ dekat perkotaan biasanya masih mengarah seperti wilayah satu. Namun dalam hal bekerja/usaha, wilayah 3 masih lebih tinggi dibanding dengan wilayah 1, meskipun juga petani masih berorientasi terhadap bantuan yang diberi oleh pemerintah.

Secara umum di 3 wilayah tersebut masih memegang budaya menyimpan hasil panen padi dan jagung untuk kebutuhan pangan/kemaman pangan mereka dalam kurun waktu yang lama, bahkan hingga musim tanam berikutnya. Dilihat dari sisi ketahanan pangan, petani di ketiga wilayah tersebut sangat baik, mereka menjual hasil panen jika lebih ataupun kebutuhan yang sangat mendesak. Sedangkan kebutuhan lainnya mereka mengandalkan hasil perkebunan (mete, kopi, kakao, biofarma dan buah-buahan).



Dilihat dari tingkat pendidikan petani, sebagian besar petani SBD didominasi oleh petani tidak tamat SD, selebihnya tamatan SD, SMP dan SMA. Sedikit ditemui pemuda S1 yang terjun di bidang pertanian (informasi Dinas Pertanian SBD). Secara umum pengetahuan budidaya dan pascapanen petani Sumba Barat Daya di peroleh dari PPL, NGO dan pedagang pestisida, sehingga akses pengetahuan petani tentang *Good Agriculture Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)* sangat minim.

3.3. Aktor Kunci Pengembangan Sektor Pertanian

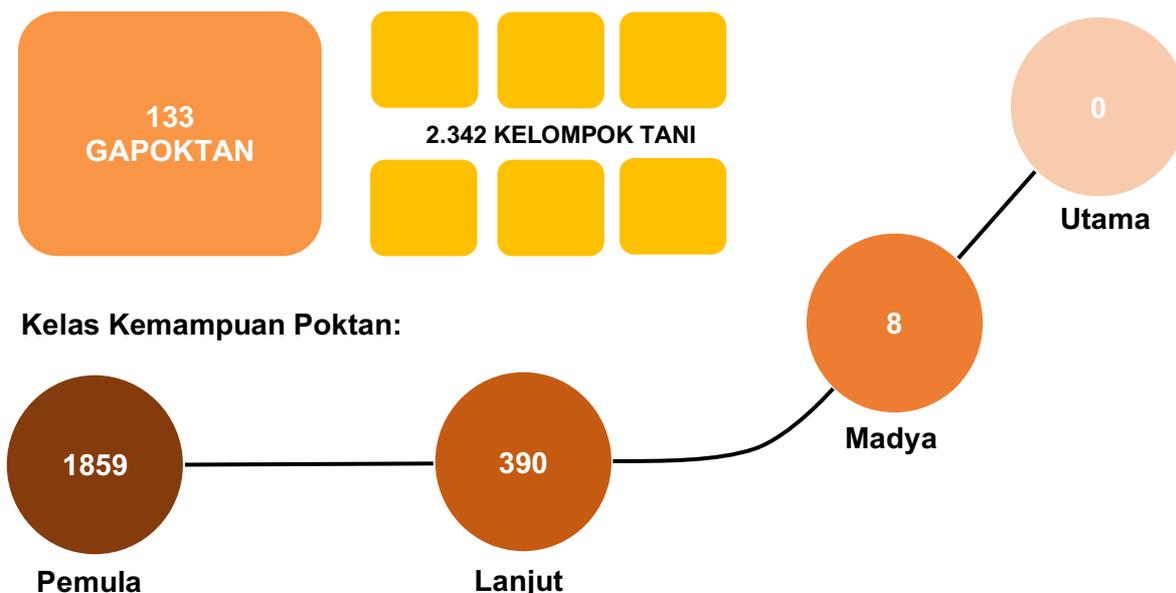
a) Dinas Pertanian Kabupaten

Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Pertanian Kabupaten SBD, saat ini Dinas belum memiliki perencanaan program jangka pendek dan menengah yang cukup jelas untuk penguatan sektor pertanian SBD. Masih belum adanya program-program pemberdayaan yang intensif mulai dari hulu hingga hilir hingga akses pemasaran. Saat ini dinas masih fokus pada intensifikasi produksi pangan (padi dan jagung) melalui penyaluran bantuan bibit padi dan jagung, pupuk urea dan pestisida saja, serta pendampingan yang difasilitasi oleh PPL, yang inipun dirasa kurang optimal baik kapasitas PPL, jumlah dan waktu. Selain itu dukungan infrastruktur irigasi, sumur bor, ataupun teknologi pascapanen juga masih kurang dilakukan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas, bahwa jangka panjang SBD akan didorong menjadi kabupaten sentra jagung. Hal ini terlihat dari adanya program yang di gagas oleh Gubernur NTT yaitu Program TJPS (Program Tanam Jagung Panen Sapi: diharapkan hasil panen 1 ha akan setara dengan harga sapi/keuntungan hasil panen akan difungsikan untuk membeli sapi). Program TJPS masih di fokuskan di Kecamatan Kodi Utara dan Wawewa Selatan dengan target luasan yaitu 350 Ha dengan target 350 petani jagung. Kriteria petani diantaranya petani pemilik lahan dengan minimal luasan 1 Ha dan terdaftar di kelembagaan kelompok tani. Masing-masing petani akan mendapatkan benih jagung, pupuk, pestisida dan pengolahan tanah. Secara khusus tantangan disektor

b) Kelompok Tani Sumba Barat Daya

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pertanian SBD, jumlah gapoktan dan poktan hingga tahun 2020 yang tersebar di 175 Desa/Kelurahan yaitu sebanyak 133 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), terbagi menjadi 2.342 kelompok tani dengan jumlah total petani yaitu 41.159 Kepala Keluarga Tani. Secara khusus, Dinas Pertanian SBD belum memiliki data jumlah kelompok tani perempuan, berdasarkan wawancara bahwa jumlah diatas termasuk kelompok petani perempuan. Setiap poktan dibagi menjadi kelas kemampuan dibedakan berdasarkan aktivitas dan kemandirian poktan yaitu pemula, lanjut, madya dan utama:



Secara umum, setiap kelompok tani memiliki rata-rata jumlah anggota sebanyak 25 orang petani, dengan rata-rata kepemilikan lahan seluas 1 ha/petani.

Berdasarkan wawancara kepada 8 ketua kelompok tani di Kecamatan Kota Tambolaka, Laura, Kodi, Kodi Utara dan Wawewa Tengah diperoleh informasi bahwa peran kelompok tani masih kurang efektif dalam mengkampanyekan penerapan *Good Agriculture Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)* kepada anggotanya.

- **Kelompok Tani Organik**, Desa Watu Kawula, memiliki anggota kelompok sebanyak 10 orang. Lahan yang dimiliki setiap anggota sebesar 1 Ha/petani. Jenis tanaman yang saat ini banyak diusahakan ialah padi, jagung, jambu mente, pinang, dan tanaman kehutanan. Cara budidaya tanaman kelompok tani bersifat semi organik, yaitu dengan memanfaatkan kotoran ternak dan dedaunan sebagai pupuk untuk tanaman. Kelompok tani ini mampu memproduksi pupuk kandang sebanyak 3 ton per 2 bulan. Pupuk kandang tidak diperjualbelikan namun hanya untuk digunakan oleh masing-masing anggota kelompok. Akan tetapi, produk atau hasil panen padi masih dijual dengan harga yang sama meskipun menerapkan pola organik yaitu Rp 10.000/kg.
- **Kelompok Tani Merahudi**, memiliki anggota kelompok kurang lebih 15 orang. Setiap anggota kelompok memiliki luas lahan rata-rata sebesar 1 Ha/petani. Jenis tanaman yang banyak diusahakan ialah tanaman jambu mente, jagung dan padi. Selain itu terdapat juga tanaman kehutanan. **Kelompok Tani Dahagehe dan Merahudi**, memiliki anggota kelompok kurang lebih 20 orang dengan Bapak Linus sebagai ketua kelompok tani. Setiap anggota kelompok memiliki luas lahan rata-rata sebesar 1 Ha. Jenis tanaman yang banyak diusahakan tidak jauh berbeda dengan kelompok tani merahudi yaitu tanaman jambu mente, jagung dan padi. Selain itu terdapat juga tanaman kehutanan. Kelompok Tani Dahagehe dan Merahudi memiliki varietas padi lokal yang khas. Varietas padi lokal tersebut ialah **Parewangi**. Pola tanam yang dilakukan ialah tumpang sari tanaman jambu mente, jagung dan padi. Hasil panen padi dalam 1 Ha hanya mencapai 2 karung/musim panen, jambu mente sebanyak 50-100 kg /bulan. Jarak tanam yang digunakan pada tanaman jambu mente, jagung dan padi berturut-turut ialah 12m x 10m; 2m x 1,5m; dan 25cm x 25cm. Petani juga hanya meluangkan sedikit waktunya untuk ke lahan yaitu 3 jam per hari
- **Kelompok Tani Jahawaludoku 2**, berada di Desa Kapakamandeta Kecamatan Kodi. Kelompok tani memiliki 15 anggota, namun hanya 5 anggota saja yang aktif dalam kegiatan rutinitas. Luas lahan yang dimiliki setiap anggota kelompok kurang lebih 2 Ha. Jenis tanaman yang ditanam ialah tanaman jagung hibrida dan padi. Kelompok tani Jahawaludoku 2 biasanya menanam jagung hingga 2 MT, sedangkan tanaman padi hingga 1 MT. Hal tersebut karena lahan masih sulit dalam mendapatkan air. Sebagian lahan kelompok tani Jahawaludoku 2 juga masih ada yang belum memiliki saluran irigasi. Setiap anggota biasanya mengumpulkan hasil panennya di ketua kelompok untuk dijual bersama. Hasil panen akan dijual langsung ke kota atau juga dapat diambil langsung di tempat. Harga jual jagung pipil ialah 3000 per Kg.
- **Kelompok Tani Eka Cipta**, Cipta berada di Kecamatan Wewewa Tengah. Jumlah anggota kelompok tani sebanyak 23 orang. Jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan sangat beragam antara lain pinang, kelapa, cengkeh, tanaman kehutanan, padi dan jagung. Rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh setiap anggota ialah 1-2 Ha lahan. Hasil panen dijual langsung ke pasar. Berdasarkan observasi langsung dilapang, terdapat jenis tanaman yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi yaitu tanaman vanili. Tanaman vanili ini sudah sejak lama dikembangkan, akan tetapi ketika harga menurun, tanaman vanili mulai kurang dikembangkan.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi yang menyebabkan peran dan fungsi kelompok tani belum optimal, diantaranya :

- Konflik antar anggota (saling curiga), mengakibatkan rendahnya komitmen anggota
- Lemahnya kelembagaan kelompok, banyak kelompok tani dibentuk untuk mendapatkan bantuan bibit, pupuk dan pestisida
- Rata-rata kelompok tidak memiliki perencanaan yang jelas tentang pengembangan dan keberlanjutan kelompok
- Jarang melakukan pertemuan kelompok
- Minimnya teknologi khususnya alat untuk pembuatan pupuk kompos.
- Hama dan penyakit tanaman padi dan jagung seperti ulat penggerek tongkol jagung, ulat spodoptera pada jagung, penggerek batang padi dan penyakit tular tanah
- Kurangnya pemahaman dalam melihat peluang pasar

c) **Kelompok Tani Perempuan (KWT) Sumba Barat Daya**

Secara Khusus jumlah kelompok tani perempuan di Sumba Barat Daya masih belum teridentifikasi. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten, dari 3 kelompok tani perempuan yang di kaji terdapat 2 Kelompok Tani yang telah mengolah produk pertanian menjadi produk olahan siap jual. Serta kedua kelompok ini menjadi andalan Dinas Pertanian dalam acara-acara di tingkat provinsi ataupun nasional. Diantaranya:

1. Kelompok Tani Perempuan Evata 2 di Kecamatan Loura
2. Kelompok Ole Dewa 2 di Kecamatan Wawewa Tengah

Kelompok Wanita Tani Evata 2, memiliki 25 anggota petani wanita. Saat ini 25 anggota melakukan budidaya tanaman pangan (padi, jagung dan tanaman lainnya dalam jumlah kecil). Selain budidaya Kelompok Tani Evata 2 juga melakukan pengolahan pasca panen komoditas menjadi produk makanan ringan diantaranya tortilla dari jagung, keripik kelor, olahan biji jambu mente, tepung kelor dan olahan keripik lainnya. Kegiatan pengolahan ini hanya dilakukan oleh 5 orang anggota saja, sedangkan 20 anggota lainnya masih enggan untuk mengolah. Disadari bahwa produk olahan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dibandingkan dijual mentah (misalnya 1 kg jambu mete glondongan seharga Rp 20.000, sedangkan olahan mete goreng dihargai Rp 200.000/kg. sedangkan olahan tortilla memiliki harga jual yang cukup tinggi antara Rp 50.000 – Rp 100.000 per kg). Di sektor produksi saat ini masih berbasis pesanan saja/menunggu permintaan dari konsumen, dengan kata lain belum di produksi secara kontinue. Adapun kendala yang dihadapi kelompok diantaranya:

- Lemahnya komitmen anggota kelompok untuk ikut serta dalam proses pengolahan produk
- Kemasan yang kurang menarik dan mudah rusak, dikarenakan di SBD masih belum ada jasa cetak kemasan, saat ini mengandalkan pemesanan dari Surabaya dan Yogyakarta
- Belum adanya ijin PIRT/BPOM dikarenakan tidak adanya rumah produksi
- Minimnya alat produksi (alat vacuume sealer dan alat penepung)
- Lemahnya akses pemasaran

Kelompok Wanita Tani Ole Dewa 2, tidak jauh berbeda dengan KWT Evata 2. Jumlah anggota yang ada di kelompok Ole Dewa 2 adalah 30 orang dan seluruh anggota berjenis kelamin perempuan. Aktivitas utama yang dilaksanakan ialah pengolahan hasil pertanian dan budidaya tanaman. Saat ini KWT Ole Dewa memproduksi produk olahan berupa kopi kelor dan jahe kelor dan menjadikannya produk unggulan kelompok.

Anggota kelompok memiliki komitmen yang kuat dan rutin memproduksi sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Adapun kendala yang dihadapi kelompok, diantaranya:

- Kemasan yang kurang menarik dan mudah rusak, dikarenakan di SBD masih belum ada jasa cetak kemasan, saat ini mengandalkan pemesanan dari Surabaya dan Yogyakarta
- Minimnya alat produksi (alat vacume, sealer dan alat penepung)
- Belum adanya ijin PIRT/BPOM dikarenakan rumah produksi tidak memenuhi standart (saat ini dalam tahap membangun rumah produksi)
- Akses pemasaran masih terbatas

Menarik lagi, KWT Ole Dewa 2, pada tahun 2007 mendirikan sebuah Koperasi Kelompok tani yang diberi nama KSU Ole Dewa yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan anggotanya 50 orang. Tahun 2010 Koperasi resmi terdaftar dan berbadan hukum, hingga saat ini tahun 2020 memiliki jumlah anggota 2.800 orang. Simpanan berasal dari sisa keuntungan panen komoditas anggota kelompok.

d) Pemerintah Desa

UU No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar
- Pembangunan sarana dan prasarana
- Pengembangan potensi ekonomi lokal
- Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berbasis UU Desa, desa memiliki peran yang penting dalam mengembangkan potensi desanya, seringkali desa salah dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan program-program yang tidak sesuai dengan potensi desanya. Kajian cepat ini mencoba melihat pola perencanaan pembangunan potensi ekonomi lokal di sektor pertanian di 3 desa, yang telah diketahui dimana 80% mata pencaharian utama masyarakatnya dari pertanian. Berikut desa yang dijadikan sampel:

- Desa Rama Dana, Kecamatan Laura

Desa Rama Dana memiliki 23 kelompok tani yang beranggota rata-rata 25 orang. Desa Rama Dana saat ini berfokus pada pembangunan sektor pertanian khususnya pada pengolahan paska panen komoditas unggulan mereka yaitu jagung dan padi. Pemerintah Desa telah mengembangkan jasa pengolahan lahan, mesin pemipil jagung dan perontok padi yang semuanya akan di kelola BUM Desa. Nantinya secara bertahap BUM Desa akan didorong menjadi tempat pemasaran bersama hasil panen petani.

- Desa Kalena Wanno, Kecamatan Kota Tambolaka

Warga Desa Kalena Wanno umumnya memiliki pekerjaan bertani, usaha dagang dan ternak skala rumah tangga. Potensi pertanian terbesar yaitu jagung dan jambu mente. Guna mendukung sektor pertanian, Pemerintah Desa saat ini memiliki program pembuatan sumur bor untuk dimanfaatkan untuk pemenuhan air keluarga dan kebutuhan budidaya pertanian. Hingga saat ini sudah ada 4 sumur bor yang telah selesai dibangun dan dimanfaatkan. Program sumur bor akan diperbanyak secara bertahap hingga memenuhi keseluruhan kebutuhan air masyarakat desa.

Selain itu juga Pemerintah Desa juga mendorong program Dapur Sehat (menanam sayuran di polibag/botol bekas di sekitar pekarangan rumah, ditujukan untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga). Namun kegiatan ini masih memiliki kendala dalam replikasi, dimana komitmen masyarakat masih lemah, masyarakat masih enggan untuk menanam.

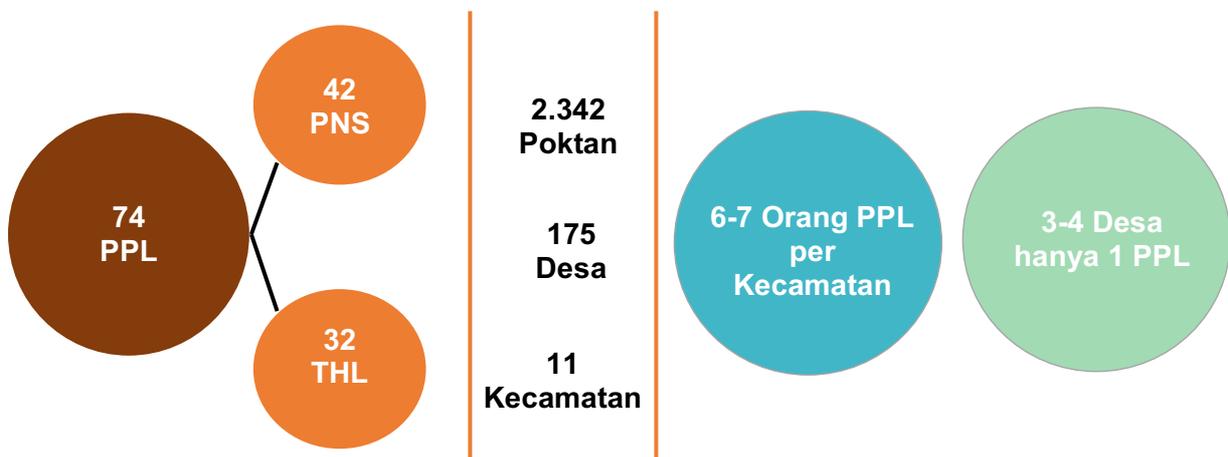
- Desa Watu Kawula, Kecamatan Kota Tambolaka

Tidak jauh berbeda dari kedua desa diatas, sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani, dan terbagi menjadi 42 kelompok tani dengan rata-rata anggota sebanyak 20 petani. Komoditas mete menjadi komoditas unggulan dan terbanyak dibudidayakan oleh petani. Saat ini Pemerintah Desa belum memiliki program khusus tentang pemberdayaan potensi pertanian yang ada, namun memiliki perdes tentang larangan menjual tanah produktif (pertanian dan perkebunan) ke masyarakat luar desa dan mengatur alih fungsi lahan produktif ke non produktif, hal ini diberlakukan karena banyak masyarakat yang masih memegang budaya pesta dengan biaya besar, sehingga banyak kasus menjual tanah untuk menutupi hutang mereka. Selain itu Pemerintah Desa juga mendorong program Dapur Sehat (menanam sayuran di polibag/botol bekas di sekitar pekarangan rumah, ditujukan untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga). Namun kegiatan ini masih memiliki kendala dalam replikasi, dimana komitmen masyarakat masih lemah, masyarakat masih enggan untuk menanam.

Dalam proses pengembangan program di sektor pertanian di tingkat desa, secara umum pemerintah desa memahami potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Keinginan pemerintah desa untuk mengembangkan sektor pertanian cukup tinggi, hanya saja masih kurang perencanaan dan pendampingan baik dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, OPD terkait. Adapun tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam membangun sektor pertanian, diantaranya:

- Manajemen kelompok tani masih lemah
- Tingginya kecemburuan antar anggota kelompok tani
- Komitmen dan kesadaran masyarakat dalam mengoptimisasi lahan masih lemah
- Pengetahuan tentang GAP, GHP dan pengendalian hama penyakit yang masih rendah
- Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dan herbisida, yang menyebabkan menurunnya produktivitas dan kualitas tanah
- Petani masih berorientasi pada bantuan, belum berfikir kepada kemandirian
- Adat istiadat pesta mempengaruhi pola ekonomi dan sosial

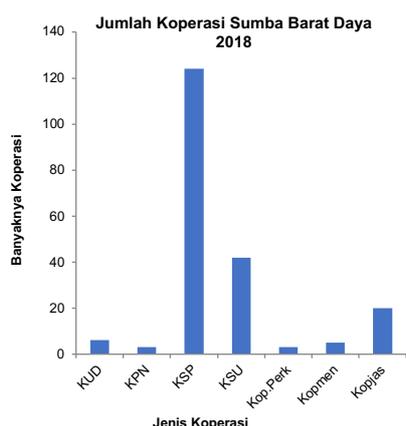
e) Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL)



Mengingat akses utama pengetahuan tentang budidaya dan pasca panen berasal dari PPL, menjadikan PPL menempati peran yang penting dalam mengedukasi masyarakat petani. Pentingnya peran PPL tidak diimbangi dengan jumlah dan penguatan kapasitas bagi PPL itu sendiri. Dilihat dari jumlah 1 PPL mendampingi 3-4 desa, dengan rata-rata minimal 20 kelompok tani per desa setara dengan 60-80 kelompok tani/PPL. Mengakibatkan peran fasilitasi, edukasi dan pendampingan tidak efektif, dimana 1 kelompok tani hanya 1-2 kali pertemuan per bulan.

Dari wawancara yang dilakukan, penguatan kapasitas bagi PPL tentang GAP dan GHP juga menjadi kendala, dimana program penguatan kapasitas minim dilakukan. Proses fasilitasi, PPL hanya dibekali dengan modul atau SOP yang sudah disusun oleh Kementerian Pertanian. Dimana SOP/Modul yang ada beberapa tidak sesuai/cocok diimplementasikan pada petani SBD, karena SBD sendiri memiliki karakter tanah dan iklim yang berbeda. Hingga saat ini Dinas Pertanian belum memiliki/menyusun standart GAP dan GHP yang sesuai dengan konteks SBD. Dari sisi alokasi pembiayaan pendampingan kelompok tani, PPL juga menyebutkan bahwa anggaran pemberdayaan yang tersedia tidak mencukupi untuk mengcover keseluruhan kelompok tani yang ada. Peranan PPL sebagai fasilitator seharusnya lebih diperhatikan bagi Dinas Pertanian, yaitu dalam hal alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas-fasilitas dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang saat ini masih belum terlaksana secara optimal.

f) **Lembaga Keuangan (KOPDIT Swastsari)**



Aspek permodalan menjadi sektor penting bagi petani dan terkadang tidak bisa dilepaskan khususnya di sektor pertanian. Koperasi menjadi salah satu akses permodalan bagi petani untuk menghilangkan praktik-praktik ijon yang masih ada di Sumba Barat Daya.

KSP KOPDIT Swastsari menjadi salah satu layanan simpan pinjam yang memiliki 12 kantor cabang di SBD dengan 1.800 anggota dan sebagian besar adalah petani, dan kantor terbanyak berada di Kecamatan Kodi sejumlah 4 Kantor Cabang. Saat ini modal yang tersimpan sebesar 16.8 milyar, dengan bunga simpan pinjam 0,5-1,8%.

KOPDIT Swastsari memiliki komitmen yang kuat untuk bidang sosial khususnya memberikan pelayanan keuangan mikro bagi petani. Hal ini terlihat dari komitmen KOPDIT Swastsari terlibat dalam Program M4P (*Making Markets Work for The Poor*) yang digagas oleh Prisma, PT Bisi dan PT Ditant. Dimana KOPDIT Swastsari berperan dalam penyediaan kredit mikro bagi petani jagung sebesar 1.2 – 2 juta/petani. PT Bisi sebagai penyedia input benih dan pendampingan budidaya serta PT Ditant sebagai pembeli jagung hasil panen petani.

3.4. Penguasaan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen

Teknologi pendukung budidaya pertanian seperti hand traktor, mesin perontok padi, mesin pipil jagung dan lain sebagainya keberadaannya masih sangat terbatas. Melihat situasi tersebut, Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa, melalui alokasi dana desa, mengupayakan pengadaan mesin produksi, rata-rata pengadaan berjumlah 2-5 mesin/desa. Kriteria penerima bantuan hanya pada kelompok-kelompok tani yang memiliki komitmen dan etos kerja yang tinggi dalam berbudidaya pertanian, tidak semua kelompok mendapatkan bantuan alat.

Pengadaan ini terkadang menjadi permasalahan tersendiri bagi kelompok-kelompok lainnya yang tidak memperoleh bantuan mesin, timbulnya kecemburuan antar kelompok tani dalam satu desa. Secara umum ketersediaan dan penguasaan teknologi sederhana dalam budidaya, perawatan dan paska panen sangat minim.

3.5. Aspek Ekonomi (Pendapatan)

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki berbagai macam suku dan kelompok etnis serta pranata sosial yang sangat bervariasi seperti budaya, adat istiadat, bahasa, pola hidup sehari-hari yang semua ini cukup mempengaruhi pola pengelolaan ekonomi keluarga.

Berdasarkan Data Indikator Ekonomi SBD 2018, dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk SBD pada tahun 2018 adalah sebesar 502.585 rupiah dengan rincian untuk konsumsi makanan sebesar 326.225 rupiah atau sebesar 64,91 persen, sedangkan untuk konsumsi non makanan sebesar 176.357 rupiah atau 35,09 persen. Nilai pengeluaran untuk makanan yang lebih besar dari pada non makanan mengindikasikan bahwa taraf hidup masyarakat SBD masih rendah. Secara umum konsumsi makanan masih menjadi pengeluaran dominan pada masyarakat yang memiliki pengeluaran kurang dari 1.500.000 rupiah per kapita sebulan. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya masih relatif rendah karena untuk memenuhi kebutuhan pangan saja sampai dibutuhkan sebagian besar (lebih dari 50 persen) pendapatannya.

Pada tahun 2014, PDRB per kapita Sumba Barat Daya sebesar 7,74 juta rupiah dan selanjutnya terus meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 10,29 juta rupiah pada tahun 2018. Angka pendapatan per kapita ini mencerminkan rata-rata pendapatan setiap penduduk Sumba Barat Daya dalam satu tahun (Data Indikator Ekonomi SBD 2018).

Pendapatan di sektor pertanian bersifat fluktuatif yang dipengaruhi oleh tingkat pemupukan, perawatan dan serangan hama penyakit tanaman yang berdampak pada produktivitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok tani pendapatan dari sektor pertanian padi dan jagung dengan luas 1 Ha dengan 1 kali masa tanam jagung (hasil panen 3-4 ton/ha) dan 1 masa tanam padi (hasil panen 2-3 ton/ha) menghasilkan rata-rata sebesar pendapatan Rp 1.500.000 – 2.000.000 per bulan/petani/ha. Produktivitas ini cukup rendah dibandingkan rata-rata produktivitas jagung nasional 6 ton per hektar. Produktivitas jagung paling tinggi mencapai di atas 8 ton per hektar, sedangkan rata-rata produktivitas padi nasional sebesar 5,7 -6 ton/ha.

3.6. Arah Kebijakan Sektor Pertanian

Tabel 7. Arah kebijakan pertanian/pangan di Indonesia

Kebijakan	Keterangan
Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<p>Dasar Penyelenggaraan Pangan: kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.</p> <p>Tujuan Penyelenggaraan Pangan: Peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang beraneka ragam, Kecukupan dan harga pangan yang wajar dan terjangkau, Peningkatan akses, nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan, Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, Peningkatan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan</p>

Kebijakan	Keterangan
UU No. 19/2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	Kedaulatan dan kemandirian petani untuk peningkatan taraf kesejahteraan, Penyediaan prasarana dan sarana Pertanian, Memberikan kepastian Usaha Tani , Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen, Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani, Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Mengatur tentang tujuan Ketahanan Pangan dan Gizi. Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi, maka diatur juga mengenai Cadangan Pangan, Jenis Pangan Pokok Tertentu, Penganekaragaman Pangan, dan Keterjangkauan Pangan.
Peraturan Presiden No. 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG)	KSPG terdiri atas kebijakan strategis di bidang ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; pemanfaatan pangan; perbaikan gizi masyarakat; dan penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18/Permentan/RC.040/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	Peraturan ini mengatur bahwa Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Sebagai bentuk perwujudan atas Peraturan Menteri ini, maka disusunlah Masterplan, kemudian Road Map, dan terakhir Action Plan.

Tabel 8. Arah program/kebijakan pengembangan pertanian ditingkat Provinsi NTT

1.	Pengembangan lahan kering dengan dengan fokus pengembangan Moringga-jagung-ternak sapi dan kambing pada wilayah potensial
2.	Peningkatan infrastruktur irigasi, listrik dan air minum dengan mempertimbangkan wilayah kualitas yang paling rendah
3.	Kegiatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya dibangun merata karena tingkat permasalahan yang dihadapi relatif sama
4.	Pengembangan pariwisata melalui perbaikan destinasi wisata dan perbaikan kampung adat pada wilayah potensial

Tabel 9. Arah program/kebijakan pengembangan pertanian ditingkat Kabupaten Sumba Barat Daya

1.	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Sumba, yang memiliki sector unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan
2.	Memperkuat Kabupaten Sumba Barat Daya di daratan Sumba sebagai pusat pengembangan pertanian, pariwisata dan Kelautan/Perikanan
3.	Program 100 hari Desa Berkecukupan Pangan: Persiapan lahan jagung oleh masyarakat dan pemerintah desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan alsintan

	<ul style="list-style-type: none"> • Benih jagung disiapkan oleh kementerian pertanian sebanyak 25 rb ton • Mengoptimalkan penyuluh pertanian • Pemberdayaan kelompok tani • Pembukaan lahan baru • Memastikan bibit dan pupuk tersedia dan terdistribusi tepat waktu • kebijakan lokal/optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pasca panen
--	--

3.7. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Sektor Pertanian

a) Aspek Sumber Daya Alam

- Besarnya potensi komoditas baik pertanian dan perkebunan masih belum dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari cara budidaya yang kurang ramah lingkungan dengan tingginya penggunaan pupuk kimia urea dan herbisida menyebabkan menurunnya kualitas tanah, berdampak pada rendahnya produktivitas
- Pengelolaan limbah ternak (sapi, kambing dan babi) serta serasah daun untuk pupuk organik sudah banyak yang ditinggalkan oleh petani. Mereka memakai pupuk kompos organik jika pasokan pupuk kimia terlambat. Hanya sebagian kecil kelompok tani yang mengolah pupuk kompos
- Pasokan sayuran untuk gizi keluarga masih kurang, dapur sehat masih enggan untuk dilakukan oleh masyarakat luas
- Komoditas kehutanan belum dikelola dengan baik (aren, dll)
- Pola iklim Simba Barat Daya yang saat ini tidak menentu
- Potensi sumber air (sungai besar dan embung yang dibangun pemerintah untuk irigasi) masih belum di kembangkan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten
- Tantangan di sektor komoditas:
 - Komoditas padi ladang dan jagung lokal, sudah banyak ditinggalkan dan tidak dibudidayakan lagi oleh masyarakat. Jagung lokal ditanam jika pasokan bantuan bibit dari pemerintah terhambat, mau tidak mau mereka menanam jagung lokal
 - Tingginya serangan hama dan penyakit tanaman Tanaman padi : Hama (penggerek batang padi, ludi, walang sangit), Penyakit (jamur/cendawan tular tanah). Tanaman Jagung : Hama (Ulat Spodoptera, penggerek tongkol, belalang), Penyakit (Hawar daun)
 - Kurangnya perawatan dan sanitasi kebun (pemangkasan dan penjarangan cabang dan ranting non produktif)
 - Budidaya komoditas belum sesuai dengan GAP dan GHP
 - Sebagian besar hasil panen dijual gelondongan, mengakibatkan harga murah
 - Pengolahan pasca panen hanya dilakukan oleh kelompok perempuan, sedangkan kelompok tani laki-laki hanya menjual gelondongan

b) Aspek Sumber Daya Manusia

- Rendahnya tingkat pendidikan petani (tidak lulus SD dan lulus SD) cukup mempengaruhi komitmen untuk berbudidaya sesuai GAP dan GHP
- Pengetahuan budidaya GAP dan GHP petani masih lemah, hal ini terlihat dari tingkat kemampuan kelas kelompok tani yang sudah ada lebih dominan kelas pemula jika dibandingkan dengan kelas lanjut, madya dan utama.
- Mengingat sukses pengetahuan utama petani berasal dari PPL, tugas dan fungsinya saat ini masih kurang efektif dan lemah dalam melakukan pendampingan dikarenakan jumlah PPL terlalu sedikit
- Lemahnya manajemen kelompok tani
- Tidak adanya perencanaan yang jelas pengembangan kelompok tani
- Petani ataupun kelompok tani masih berorientasi terhadap bantuan pemerintah, sehingga membuat ketergantungan petani
- Partisipatif anggota yang masih minim/kurang. Setiap anggota masih banyak yang tidak ikut dalam kegiatan kelompok
- Konflik antar kelompok maupun didalam kelompok terhadap bantuan yang diberikan atau kegiatan yang sering dilaksanakan oleh pemerintah
- Adat pesta yang sangat tinggi (banyak terjerat hutang, akibat pesta yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga)
- Secara umum belum terbentuknya akses pemasaran bersama di tingkat kelompok untuk peningkatan harga

c) Aspek Teknologi

- Ketersediaan teknologi, hand tractor, perontok padi dan penggiling jagung masih sedikit belum menjangkau total potensi yang ada. Ketersediaan masih terbatas pada kelompok tani tertentu
- Teknologi irigasi yang dibangun pemerintah pusat, belum beroperasi dan belum menjangkau lahan petani
- Teknologi pengolahan kompos juga belum tersedia
- Alat pengolahan pasca panen pembuatan produk di kelompok tani perempuan juga masih konvensional (penepung, pengemasan dll)
- Rumah produksi makanan olahan belum berstandart BPOM

d) Aspek Kebijakan

- Kebijakan yang menysasar langsung tentang pengembangan sektor pertanian di kabupaten Sumba Barat Daya belum kuat dan belum diterapkan dengan baik
- Dukungan dan program Dinas Pertanian Kabupaten baru sebatas bantuan bibit, pupuk dan pestisida dan beberapa teknologi
- Kurangnya program penguatan kapasitas tentang kelembagaan dan perencanaan di tingkat Kelompok Tani
- Program penguatan bagi PPL juga masih sedikit dilakukan
- Sebagian besar pemerintah desa sudah memahami potensi desanya, namun kurangnya pendampingan dan perencanaan tentang pengembangan sektor pertanian desanya
- Pendampingan perolehan ijin PIRT/BPOM/Halal masih belum difasilitasi dengan baik oleh pemerintah

BAB 4. IMPLEMENTASI KAJIAN

AGRICULTURE LIVELIHOOD ASSESSMENT IN SOUTHWEST SUMBA

4.1. Tujuan Study

Kajian bertujuan untuk memetakan potensi sumberdaya alam serta memahami kendala dan keterbatasan mata pencaharian sektor pertanian yang dihadapi. Selain itu, kajian juga akan memberikan informasi tentang keamanan pangan, mata pencaharian dan kegiatan ekonomi rumah tangga (masyarakat) saat ini. Kajian ini akan mengumpulkan data dan informasi dari para stakeholders kunci mulai dari rumah tangga yang berpartisipasi dalam program revitalisasi PAUD WLF di Kabupaten SBD (dengan menjadikan rumah tangga ini sebagai responden sasaran dan pemangku kepentingan utama). Selain itu juga akan menggali informasi dari kelompok tani, pemerintah desa, kabupaten, UPTD dan pelaku usaha komoditas terkait.

4.2. Deliverables

Rincian deliverable yang diharapkan yang dihasilkan dari kajian “*Agriculture Livelihood Assessment in Southwest Sumba*” adalah sebagai berikut:

- a) Kajian Demographic dan Profil Komoditas laporan kajian ini akan mencakup profil demografis target responden (usia, jenis kelamin, pekerjaan, status pendidikan, tingkat pendapatan, aset produktif, sumber pendapatan dari sektor pertanian, rumah tangga yang rentan, pengetahuan akan nutrisi/makanan bergizi bagi keluarga, pengeluaran makanan dan bukan makanan, peran perempuan dalam sektor pertanian dan non-pertanian, dll). Serta aksesibilitas dan keterjangkauan makanan pokok.
- b) Kajian Rantai Nilai Komoditas Potensial laporan rantai nilai komoditas akan mencakup jenis komoditas potensial yang dibudidayakan, luasan lahan, produktivitas serta aset ,kalender musiman, dll. Analisis rantai nilai dan rantai pasar komoditas potensial di wilayah sasaran. Analisis SWOT dan strategi pengembangan produk berbasis rantai nilai yang paling relevan. Serta analisis kebijakan pemerintah guna mendukung produksi dan mata pencaharian masyarakat.

4.3. Metodolologi

- a) **Study Approach:** Kajian demografi wilayah akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode wawancara mendalam kepada rumah tangga petani sebagai responden sasaran dan pemangku kepentingan utama. Sedangkan kajian rantai nilai akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada aktor kunci kelompok tani, pemerintah desa, kabupaten, UPTD dan pelaku usaha disektor pertanian.

b) Metode dan Alat Pengumpulan Data:

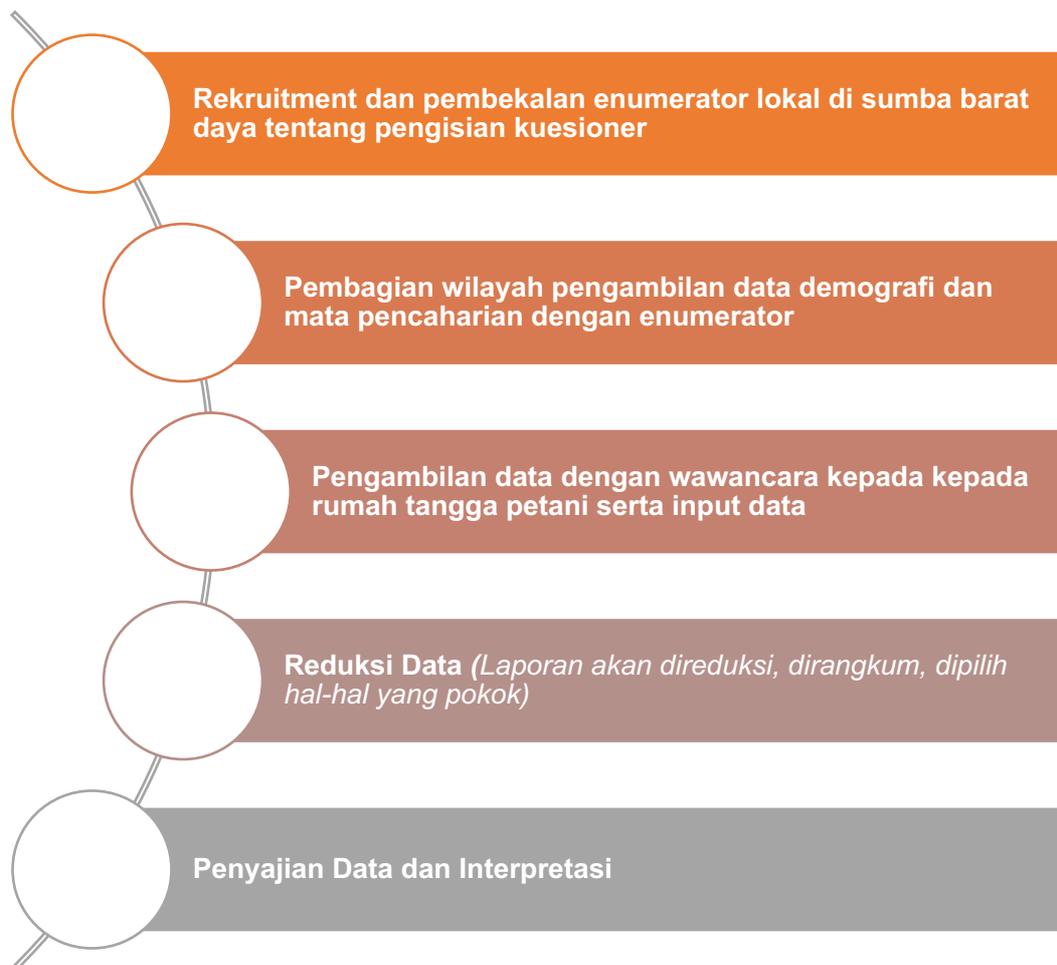
1) Pengambilan Data Skunder

Data yang berkaitan dengan kajian juga diperoleh melalui studi pustaka yaitu menjadikan buku, jurnal penelitian, BPS Kabupaten SBD dan Kecamatan serta mencari referensi lainnya melalui internet sebagai referensi dari kajian ini.

2) Pengambilan Data Primer Demografi Wilayah

Data yang diperoleh langsung dari responden yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada rumah tangga petani sasaran sebagai pemangku kepentingan utama dalam kajian ini. Kegiatan wawancara akan menggunakan alat kuesioner yang telah disusun dan dilampirkan (*Lampiran Kuesioner Demografi dan Mata Pencaharian Sektor Pertanian di Sumba Barat Daya – Penabulu Foundation*).

Alat kuesioner yang telah disusun mengandung wawancara struktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Sedangkan Wawancara tidak terstruktur wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.



3) Pengambilan Data Primer Rantai Nilai Komoditas

Hasil pemetaan demografi akan dijadikan gambaran umum pengembangan pertanian sebagai sector mata pencaharian utama di Sumba Barat Daya. Dari data demografi akan di peroleh komoditas utama dan yang paling banyak di budidayakan sebagai mata pencaharian utama. Selain itu juga untuk mendapatkan informan kunci yang relevan dalam pemetaan rantai nilai dan rantai pasok komoditas utama.

Data rantai nilai akan dilakukan dengan teknik *snowball atau chain sampling*. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan karena merupakan salah satu pendekatan untuk pengumpulan data dengan menggali informasi melalui informan kunci yang tepat terhadap kasus-kasus yang spesifik/khusus. Proses ini akan diawali dengan bertanya kepada orang atau informan yang dinilai memiliki informasi dan memiliki pemahaman yang baik atas situasi yang hendak diteliti (khususnya pada analisis aktor dan rantai pasok komoditas terpilih).

Target Aktor Rantai Nilai dan Rantai Pasok Komoditas:



Target Aktor Supporting Roles:



Catatan: Jumlah aktor akan berkembang sesuai kondisi lokal saat asesment

c) Jumlah Sampling (Responden):

Hasil rapid asesment, secara umum tidak ada perubahan metode sampling. Metode sampling tetap menggunakan **Teknik Proportional Stratified Random Sampling** adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki populasi bervariasi.

Jumlah Anggota Sample Total ditentukan melalui:

- Rumus Taro Yaname dan Slovin $[n=N/(N \cdot D)]^2+1$
- Rumus Jumlah Sample Berdasarkan Desa $ni= Ni/N * n$

Perhitungan Rumus Slovin dengan Tingkat Kepercayaan 95%:

N	=	89.419	(Jumlah Populasi)
D	=	0,05	(Standart Error 5%)
(N.D ²)+1	=	224,55	
N	=	398	(Jumlah Total Responden Pemetaan Demografi)

Jumlah responden keseluruhan di 9 kecamatan, 32 desa dengan **taraf keyakinan 95%, dengan standart eror 5%** yaitu: **398 responden**

Deskripsi:

- a) Penentuan kecamatan dilakukan multistage random sampling yang ditentukan berdasarkan Kabupaten, Kecamatan dan Desa (yang turunkan berdasarkan lokasi desa intervensi WLF).
- b) Jumlah kecamatan intervensi berjumlah 9 kecamatan dari 11 kecamatan dan diturunkan menjadi 32 desa dari 115 desa, di Kabupaten Sumba Barat Daya
- c) Jumlah responden dari 89.419 jumlah penduduk di 9 kecamatan, 32 desa, dihitung dengan menggunakan **Metode Slovin** sebesar **398 responden**.
- d) Calon responden masing-masing desa akan dilakukan dengan **metode Purposive Sampling** dengan kriteria inklusi. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel yaitu rumah tangga petani. Dengan kriteria :
 - Petani (pemilik lahan, penyewa dan penggarap)
 - Terdaftar anggota kelompok tani
 - Setidaknya mencakup 70% petani laki-laki dan 30% petani perempuan
 - Usia dibawah 60 tahun (setidaknya 30% diantaranya berusia muda 19-30 tahun)

d) Lokasi Target Pemetaan Demografi:

Target lokasi pemetaan dikhususkan di area intervensi program WLF yang telah selesai ataupun yang saat ini masih berjalan. Berdasarkan rapid asesment, adanya penambahan cakupan kecamatan dari 7 kecamatan menjadi 9 kecamatan target (Kecamatan Kodi Bangedo dan Kodi). Sedangkan jumlah desa juga ada tambahan desa menjadi 32 desa dari 28 desa target. Secara perhitungan dengan rumus Solvin tidak ada penambahan jumlah responden (jumlah responden tetap 398 petani).

Kabupaten Sumba Barat Daya	Kecamatan Sample	Total Desa	Desa Sample	Jumlah Penduduk (Ni)	Total Penduduk (N)	Jumlah Anggota Sample (n)	Jumlah Sample Per Desa (ni)
11 Kecamatan	Laura	11	Lete Konda	1851	9885	44	8
			Pogo Tena	1598			7
			Karuni	2238			10
			Letekonda Selatan	1040			5
			Ramma Dana	2540			11
			Loka Kalada	618			3
	Kodi Utara	21	Mangganipi	4242	21063	94	19
			Hombakaripit	2471			11
			Kori	7296			32
			Bokambero	4481			20
			Limbu Kembe	2573			12
	Kota Tambolaka	10	Wee Rena	2833	20036	89	13
			Wee Pangali	3028			13
			Wee Londa	3386			15
			Kalena Wano	2370			11
			Watu Kawula	3828			17
			Radamata	4591			20
	Wawewa Timur	20	Mareda Kalada	2568	8622	38	11
			Kalembu Ndara Mane	2422			11
			Mata Pyawu	1064			5
			Mareda kalada	2568			11
	Wawewa Tengah	19	Lombu	2198	11309	35	10
			Omba Rade	3093			14
Wee Kokora			2633	11			
Wawewa Barat	20	Raba Engge	3013	8130	36	13	
		Waimangura	3981			18	
		Wee Kura	1136			5	

Kabupaten Sumba Barat Daya	Kecamatan Sample	Total Desa	Desa Sample	Jumlah Penduduk (Ni)	Total Penduduk (N)	Jumlah Anggota Sample (n)	Jumlah Sample Per Desa (ni)
	Kodi Balaghar	14	Kahale	3607	6900	31	16
			Panenggo ede	1200			6
			Wainyapu	2093			9
	Kodi Bangedo	15	Umbu Ngedo	3600	3600	16	16
Kodi	19	Kapaka Madeta	3259	3259	15	15	
11 Kecamatan	9 Kecamatan	149 Desa	32 Desa	89,419 Jiwa		398 Jiwa	398 Jiwa

Catatan: tanda merah merupakan desa tambahan, desa ini memiliki kelompok kelompok tani yang memiliki komitmen yang cukup kuat dalam pengelolaan komoditasnya.

e) Kerangka Kerja Penilaian dan Sumber Data:

Pertanyaan Kunci	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
Bagaiman gambaran umum potensi SDA dan SDM, demografi serta mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya?	Desk review	BPS SBD, BPS Kecamatan, Jurnal kajian dll
Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten dan Desa dalam upaya membangun dan mengelola aset SDA dan SDM mereka mulai dari program dan kebijakan, kaitannya dalam peningkatan mata pencaharian dan pendapatan di sektor pertanian?	Desk review dan Wawancara	BPS SBD, BPS Kecamatan, Jurnal, Bupati, BAPPEDA, OPD dan Pemerintah Desa
Dari mana saja aset penghidupan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat?	Wawancara	Masyarakat dan Pemerintah Desa
Seberapa besar potensi sumber daya alam di sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat SBD?	Wawancara	Masyarakat dan Pemerintah Desa
Bagaimana masyarakat mengelola aset sumberdaya alam untuk pemenuhan penghidupan dan ekonomi keluarga?	Wawancara	Masyarakat dan Kelompok Tani
Seberapa besar tingkat kepedulian masarakat terhadap pendidikan dan kesehatan keluarga?	Wawancara	Masyarakat
Apa saja kerentanan dan kenbutuhan saat ini, terhadap kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh responden sasaran dalam hal akses ke pengetahuan, keterampilan dan sumber daya untuk kegiatan terkait pertanian?	Wawancara	Masyarakat
Bagaimana peran petani dalam rantai nilai komoditas? Apa peluang yang sesuai dengan kemampuan mereka menghasilkan mata pencaharian berkelanjutan?	Wawancara	Masyarakat

f) FGD Sosialisasi Hasil dan Validasi:

Tahap terakhir, hasil akan dipaparkan di tingkat kabupaten dengan mengundang aktor kunci yaitu Pemerintah Daerah, OPD terkait (Dinas Pertanian dan Disperindag), Camat, Kepala Desa, Ketua Kelompok Tani Laki-Laki dan Perempuan serta melibatkan sektor industri dan lembaga keuangan. Kegiatan ini ditujukan untuk mesosialisasikan hasil dan feedback dari setiap aktor kunci, dalam upaya bersama pengembangan sektor pertanian di Sumba Barat Daya.

g) Analisis dan Rekomendasi

Tahapan analisis dan pelaporan akan dibangun berdasarkan hasil pemetaan demografi dan rantai nilai komoditas. Penyusunan strategi dan rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang pengembangan komoditas pertanian Sumba Barat Daya akan didasari eksistensi dan peran Stakeholder kunci yang terlibat pada sistem pangan mulai dari hulu hingga hilir. Rekomendasi juga akan mencakup pembelajaran dan praktik terbaik yang ditemukan dalam kajian. Secara khusus analisis dan rekomendasi akan selalu mengkaitkan kemungkinan hubungan antara sektor kebijakan, sosial-ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

4.4. Potential Risk and Challenges

Potensi Resiko	Mitigasi Resiko
Tidak adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam kegiatan kajian	Awal kajian, tim melakukan sosialisasi dan mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian. Secara khusus akan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Desa dalam mendukung pelaksanaan kajian ditingkat desa, upayanya untuk memetakan potensi pengembangan sektor pertanian SBD
Rendahnya partisipasi masyarakat petani untuk menjadi narasumber (responden)	Sosialisasi dan perolehan persetujuan bebas tanpa paksaan dalam pelaksanaan kajian (PADIATAPA: bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka), melibatkan aparatur pemerintah desa, tokoh adat, pendamping desa, ketua kelompok tani dalam menentukan responden petani yang representatif
Tidak adanya kerjasama dan keterbukaan masyarakat petani memberikan jawaban/informasi yang benar	Sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan ketua kelompok tani dalam kegiatan wawancara. Selain itu kuesioner yang disiapkan lebih banyak menggunakan wawancara terstruktur yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan kunci yang sudah memiliki alternatif jawaban/sudah disiapkan untuk mengurangi resiko jawaban yang tidak diinginkan

Potensi Resiko	Mitigasi Resiko
Kurangnya kualitas kajian karena enumerator tidak mengikuti dan melaksanakan instruksi pengisian kuesioner	Tim akan melakukan penjaringan enumerator lokal diawal kegiatan, memberi mereka pemahaman dan pelatihan pengisian kuesioner. Serta tentang maksud dan tujuan kegiatan kajian secara detail dan terperinci. Tim dari jakarta akan mendampingi dan memfasilitasi pencapaian kualitas data kajian
Terjadinya keterlambatan penyelesaian kajian dikarenakan adanya konflik masyarakat ataupun bencana alam	Program akan mengidentifikasi skala dampak yang ditimbulkan. Jika skala dampak hanya di desa ataupun kecamatan. Lokasi kegiatan kajian akan dialihkan ke lokasi desa/kecamatan lain. Jika skala dampak di tingkat kabupaten kegiatan akan dilakukan sesuai kebijakan yang diterbitkan pemerintah kabupaten

4.5. Team Pelaksana

No	Kegiatan	Jumlah	Nama Tim	Kualifikasi
1	Kajian Demografi	2	• Rado Puji Santoso	Agriculture and Value Chain Specialist
			• Iswadi Idris	Community Organizing Specialist
		4	• Enumerator dan Data Entri Lokal Sumba Barat Daya	Agriculture/Community Organizing Specialist
2	Kajian Rantai Nilai	2	• Rado Puji Santoso • Dana Kristanto	Agriculture and Value Chain Specialist
3	FGD Validasi	1	• Rado Puji Santoso	Agriculture and Value Chain Specialist
4	Analisis Data Demografi dan Rantai Nilai Komoditas	4	• Rado Puji Santoso	Agriculture and Value Chain Specialist
			• Yudistira Soeherman	Sistem Data Specialist
			• Iswadi Idris	Community Organizing Specialist
			• Dana Kristanto	Agriculture Specialist
5	Penulisan Laporan	2	• Rado Puji Santoso	Agriculture and Value Chain Specialist
			• Yudistira Soeherman	Sistem Data Specialist

4.6. Timeline Kegiatan Kajian

No	Aktivitas	Bulan															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Study Pendahuluan (Inception Report)																
1.1	Pelaporan inception workshop																
1.2	Alat kuesioner dan rantai nilai																
2	Pengumpulan Data Primer dan Pengolahan Data																
2.1	Persiapan Tim dan pengumpulan data demografi di 9 kecamatan																
2.2	Input data demografi																
2.3	Pemetaan rantai nilai komoditas potensial																
2.4	FGD validasi data																
3	Analisis dan Rekomendasi																
3.1	Analisis dan penulisan hasil kajian (draft 0) <i>"Agriculture Livelihood Assessment in Southwest Sumba"</i>																
3.2	Diskusi dan masukan umpan balik draft 0 oleh WLF																
3.3	Penyempurnaan dan penyerahan laporan akhir																

Catatan: Berikut merupakan timeline kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah masa pandemi COVID-19, perubahan timeline akan dikomunikasikan dan disepakati bersama

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Sumba Barat Daya 2019. Statistik kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya. Tambolaka (ID): BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
- BPS Sumba Barat Daya 2019. Kabupaten Sumba Barat Daya dalam angka 2019. Tambolaka (ID): BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
- Perkumpulan Pikul 2015. Kebijakan Pemda, Undang-Undang Desa dan Kedaulatan Pangan di Nusa Tenggara Timur. Kupang (ID): Perkumpulan pikul
- BPS Kabupaten Sumba Barat Daya 2019. Statistik Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya 2018. Tambolaka (ID): Kabupaten Sumba Barat Daya
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. Kupang (ID): Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
- Nota Kesepakatan Nusa Tenggara Timur 2019. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019. Kupang (ID): Nuta Kesepakatan Nusa Tenggara Timur

LAMPIRAN 1. Outline Laporan Akhir

Cover

Kata Pengantar

Grosarium

Daftar Isi

Daftar Tabel dan Gambar

Ringkasan

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Ruang Lingkup
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB 2. METODOLOGI

- 2.1. Pendekatan Kajian (Kuantitatif dan Kualitatif)
- 2.2. Waktu
- 2.3. Populasi dan Sampel
- 2.4. Alat Pengumpulan Data
- 2.5. Entri Data
- 2.6. Validasi Data
- 2.7. Analisis Data

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Umum Wilayah Sumba Barat Daya

- 3.1.1. Gambaran Umum Wilayah (potensi SDMI, SDA, Sosial dan Budaya)
- 3.1.2. Aset Penghidupan Masyarakat (Aset manusia, alam, fisik dan keuangan)
- 3.1.3. Peran dan Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Aset Penghidupan

3.2. Analisis Mata Pencaharian

- 3.2.1. Data Profil dan Analisis Demografi
 - a) Usia, jenis kelamin dan status pendidikan
 - b) Aset dan pengelolaan aset produktif
 - b) Sumber pendapatan dan tingkat pendapatan dari kegiatan pertanian/non-pertanian
 - c) Pengetahuan tentang nutrisi/gizi, pengeluaran makanan dan bukan makanan serta aksesibilitas dan keterjangkauan makanan pokok.

- 3.2.2. Kontribusi Perempuan dalam peningkatan dalam sektor pertanian dan non-pertanian
- 3.2.3. Jenis dan Tingkat Kerentanan
 - a) Jenis, kendala dan keterbatasan yang dihadapi dalam hal akses ke pengetahuan, keterampilan dan sumber daya untuk kegiatan pertanian)
 - b) Pengaruh kerentanan terhadap akses pendidikan, kesehatan gizi dan mata pencaharian serta hubungan tingkat pendidikan terhadap pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya)
- 3.2.4. Strategi Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
(upaya mengatasi kendala dan keterbatasan di sektor pertanian: ketahanan pangan, konsumsi rumah tangga dan gizi serta daya beli)

3.3. Analisis Komoditas Utama

- 3.3.1. Jenis, Luasan Lahan, Luasan Lahan, Status Kepemilikan Lahan, Kesesuaian Lahan/Iklim Micro dan Kalender Musiman
- 3.3.2. Pengelolaan Komoditas Saat Ini (*tingkat dukungan SDA, SDM dan sarana prasarana*)
- 3.3.3. Peran dan Fungsi Kelembagaan Petani (*termasuk dukungan dari Pemerintah Desa, Dinas Pertanian dan Pemerintah Kabupaten*)
- 3.3.3. Tantangan dan Hambatan (*Pengetahuan teknik budidaya, dan pascapanen, teknologi dan pengendalian hama penyakit*)

3.4. Analisis Rantai Nilai Komoditas

- 3.4.1. Peta Rantai Nilai dan Rantai Pasok Komoditas Utama
- 3.4.2. Peran Petani di Rantai Nilai komoditas
- 3.4.3. Gambaran Pasar dan Peluang Pasar
- 3.4.4. Peluang dan Prioritas Pengembangan Produk Berbasis Rantai Nilai yang Paling Relevan
- 3.4.5. Analisis SWOT

3.4. Analisis Kebutuhan

(Analisis kebutuhan dalam hal peningkatan mata pencaharian di sektor pertanian mulai dari pengetahuan, keterampilan GAP dan GHP, teknologi, literasi keuangan, pemasaran, akses permodalan dan kebijakan ataupun dukungan lainnya yang relevan)

BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi
 - a) Sektor Matapencaharian Berkelanjutan
 - b) Sektor Komoditas
 - c) Sektor Keuangan
 - d) Sektor Kebijakan dan Program